BAB I

PENDAHÚLUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah memang sudah menjadi masalah yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan di wilayah Timur Tengah. Mulai dari Perang Arab-Israel, perang 1956 (Krisis Suez), perang enam Hari 1967 (Six-Day War), perang Yom Kippur 1973, Perang Teluk I dan II, Invasi Amerika Serikat ke Irak dan Afganistan, hingga konflik Israel-Palestina yang tak kunjung usai. Kini konflik baru telah muncul dengan adanya agresi militer Israel ke Lebanon dimana sebelumnya Israel pernah melancarkan serangan Israel ke Lebanon untuk mengusir PLO (Palestine Liberation Organization) tahun 1982 serta terakhir berkonflik pada tahun 2000. Konflik dan kekerasan yang terjadi di kawasan Timur Tengah kerap kali menjadi sebuah fenomena yang unik untuk dikaji lebih lanjut.

Alasan yang mendorong penulis untuk menjadikan 'Kepentingan Amerika Serikat Dibalik Agresi Militer Israel ke Lebanon 2006' sebagai judul dalam penulisan ini karena adanya ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut tentang alasan-alasan kepentingan Amerika Serikat dalam mendukung serangan Israel tersebut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Amerika Serikat bersikap bungkam terhadap kekerasan yang dilakukan Israel dan menggunakan powernya untuk mencapai ambisi dan kepentingannya. Dalam kasus Israel-Lebanon terdapat hal yang menarik dibalik semua kebungkaman

dan dukungan Amerika Serikat dalam konflik tersebut. Bukan hanya faktor historis antara Amerika Serikat dan Israel sebagai sebuah hubungan antara "Ayah dan Anak Emas" namun terdapat agenda tersembunyi dibalik dukungan Amerika Serikat itu. Hal ini merupakan fenomena yang menarik untuk dibahas.

Bagi penulis pribadi, topik penulisan mengenai keteriibatan dan kepentingan Amerika Serikat terhadap kekerasan di Timur Tengah khususnya dalam konflik Israel-Lebanon diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang lebih mendalam tentang kawasan Timur Tengah, dan bermanfaat bagi studi Ilmu Hubungan Internasional.

B. TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

- Untuk mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi di kawasan Timur Tengah, khususnya konflik Israel-Lebanon.
- Mengetahui alasan kepentingan Amerika Serikat dibalik agresi yang dilancarkan Israel ke Lebanon

C. LATAR BELAKANG MASALAH

Amerika Serikat merupakan sebuah negara pengemban utama ideologi Kapitalisme yang menganggap dirinya sebagai negara yang paling depan dalam mengusung nilai-nilai tertentu seperti demokrasi, persamaan, (egalitarianisme), HAM, pluralisme, masyarakat sipil, tata dunia baru, dan

berbagai gagasan "mulia" lainnya menurut pandangan kapitalisme. Setelah Uni Soviet runtuh. Amerika Serikat muncul sebagai sebuah negara adidaya yang mendominasi dunia. Hal tersebut terlihat dari adanya keinginan Amerika Serikat untuk menjadi Polisi Dunia dan sebagai pengawal Demokrasi. Amerika Serikat selalu mendengungkan tekadnya untuk menegakkan pelaksanaan demokrasi di seluruh dunia. Tekad tersebut dipertegas dengan dikeluarkannya Doktrin Carter (1980) yang berusaha mengaitkan masalah penegakkan hak-hak asasi manusia dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap negara lain.

Amerika Serikat telah mengklaim dirinya sebagai pendekar HAM. Amerika Serikat tidak segan-segan menjatuhkan sanksi dan hukuman baik itu politik, ekonomi dan militer kepada negara-negara yang dianggapnya tidak menghormati hak-hak asasi manusia. Berbagai tipe tindakan telah diambil Amerika Serikat terhadap negara-negara maupun kelompok yang dianggap sebagai tidak demokratis dengan melakukan pelanggaran HAM. Tindakan tersebut dapat berupa kecaman diplomatik hingga tindakan militer dengan menekankan pentingnya kebebasan individu guna menemukan kebahagiaan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Masalah penegakkan demokrasi serta penghargaan hak-hak asasi manusia selalu menjadi agenda utama yang sering ditekankan oleh Amerika Serikat walaupun dalam kenyataannya terdapat berbagai permasalahan dalam menentukan tempat dan pelaksanaan prinsip-prinsip HAM dalam politik luar

Mansyur Effendi, Hak-hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, 1994, p. 18

negeri Amerika Serikat. Sebelum perang dunia II Amerika Serikat telah menekankan di dalam kebijakan luar negerinya terkait masalah moralitas dan hak-hak asasi manusia. Penegakkan hak-hak asasi manusia merupakan penegakkan demokrasi dunia. Saat ini, pemerintah Amerika Serikat menetapkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk mencapai tujuan-tujuan dasar, yaitu:

- 1. Keamanan nasional menjaga keamanan negara bebas dan merdeka
- 2. Perdamaian dunia
- 3. Mencegah timbulnya agresi yang mengganggu kedamaian internasional
- 4. Pemerintahan sendiri dengan mengecam sikap tindakan okupasi, invasi, dan intervensi dari pihak luar

Hal tersebut terbukti pada kasus Afganistan dimana Amerika Serikat mengecam keras tindakan intervensi Uni Soviet terhadap Afganistan, kemudian kasus okupasi Irak atas Kuwait yang mana Amerika Serikat mendesak agar PBB segera mengeluarkan dan mengesahkan resolusi yang dapat secara paksa mengusir pasukan Irak dari wilayah pendudukannya.

Pasca tragedi World Trade Center pada tanggal 11 September 2001 telah membawa perubahan besar dalam politik luar negeri Amerika Serikat. Peristiwa serangan teroris yang menurut Amerika Serikat dilakukan oleh serangan teroris al-Qaeda—jaringan ekstrimis Islam yang dipimpin oleh orang buangan Saudi, Osama Bin Laden—yang para pemimpinya telah beroperasi

dari Afganistan sejak 1996² telah membawa implikasi besar terhadap pola dan arah kebijakan luar negeri. Pengagungan terhadap demokrasi dan HAM berubah arah semenjak kejadian tersebut. Enam bulan setelah serangan tersebut, presiden George W. Bush melakukan pendekatan dan kerjasama militer dengan negera manapun dalam rangka melawan terorisme. Amerika Serikat mulai mengkampanyekan gerakan anti terorisme dan melakukan perang habis-habisan melawan "terorisme global". Hal inilah yang kemudian sering melibatkan Amerika Serikat pada setiap konflik dan permasalahan yang terjadi di berbagai belahan dunia, terutama yang bersinggungan langsung dengan kepentingan nasionalnya.

Dampak dari doktrin "anti terorisme" yang dilancarkan Amerika Serikat telah meletuskan perang di Irak dan Afganistan. Perang Afganistan yang bertujuan untuk membasmi terorisme di negara tersebut ternyata gagal dengan tidak tertangkapnya pemimpin terorisme Osama Bin Laden. Sedang perang di Irak yang mengusung isu kepemilikan Weapon of Mass Destruction (WMD) atau senjata pemusnah missal ternyata tidak terbukti. Isu yang muncul setelah itu adalah masalah pelanggaran hak asasi manusia dengan banyaknya korban sipil yang tewas akibat serangkaian perang tersebut. Doktrin keamanan pemerintahan Bush membawa negara ini menyusuri turunan yang licin. Bahkan tanpa sebuah ancaman nyata, Amerika Serikat kini menyatakan memiliki sebuah hak untuk menggunakan militer terlebih dahulu atau preventif. Amerika Serikat harus siap untuk campur tangan dimanapun dan

² Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta, Freedom Institute dan Yayasan Obor Indonesia, Amerika dan Dunia (Memperdebatkan Bentuk Baru Politik Internasional), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.

kapanpun untuk menghancurkan ancaman. Teroris tak menghormati perbatasan negara, sehingga Amerika Serikat pun tak perlu menghormatinya. Selain itu, negara-negara yang menjadi sarang teroris, baik karena persetujuan atau karena mereka tak bisa menjalankan hukum mereka di wilayah mereka, secara efektif telah mengorbankan hak-hak kedaulatan mereka.³

Fenomena yang terjadi di kawasan Timur Tengah telah menjadi isu internasional yang mana keterlibatan Amerika Serikat di dalamnya tidak dapat dipungkiri. Bagi para pemimpin Amerika utamanya, Bush mengemukakan hal tentang posisi Timur Tengah dalam politik Amerika, bahwa karena kelompok teroris telah melukai negerinya pada Black September 11 September 2001, sehingga Amerika Serikat tidak hanya akan menyatakan perang pada terorisme, tetapi berkewajiban untuk memikul beban penyebaran demokrasi di Timur Tengah, yang dianggap sebagai lahan subur terorisme demi mengamankan negaranya. Pernyataan tersebut selain sebagai satu a¹1san penting melakukan kegiatan politik secara fisik dan aktif di Timur tengah juga merupakan upaya membangun demokrasi sebagai upaya prefentif mengubah "Mind Set" radikalisme yang kuat dalam ideologi perjuangan dan masyarakat Arab.4 Seperti ditunjukkan di Afghanistan serta kontroversial di Irak, satu metode dalam melakukan penyebaran demokrasi adalah dengan perang melalui invasi dan serangan preventif. Serangan-serangan semacam itu tidak akan terbatas pada memerangi terorisme tetapi juga meluas maknanya dengan

 3 Ibid hal 443

⁴ www.radarsulteng.com/demokratisasi_vs_keadilan_di_Lebanon/234416/index/point.htm/kamis 10 Agustus 2006.

mencegah negara manapun yang berani menantang supremasi keadidayaan AS saat ini dan di masa yang akan datang.

Kawasan Timur Tengah merupakan sebuah kawasan yang rawan akan konflik. Baik itu konflik antar negara Arab maupun dengan negara-negara non Arab ataupun Barat. Kawasan ini memiliki arti strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, sehingga menyimpan potensi konflik yang sangat besar. Secara geografis, kawasan Timur Tengah merupakan jalur lintas darat-laut-udara yang menghubungkan tiga benua yakni Eropa, Asia dan Afrika. Sedangkan secara geopolitik, kawasan ini merupakan cadangan minyak terbesar di dunia. Salah satu konflik yang belum juga selesai yakni konflik yang terjadi antara Arab-Israel terutama mengenai masalah Palestina. Dan belum juga konflik itu usai, kini Timur Tengah kembali dilanda krisis dan ketegangan baru yakni dipicu adanya agresi militer Israel baik dari darat, laut, maupun udara terhadap Lebanon sejak 12 Juli 2006.

Meletusnya krisis Israel-Lebanon lebih memperburuk situasi Timur Tengah yang semula sudah kacau balau. Amerika Serikat tidak saja membiarkan Israel memperluas api peperangan, tetapi juga secara terangterangan memveto resolusi Dewan Keamanan (DK) yang menuntut Israel melakukan gencatan senjata serta mengirimkan senjata canggih untuk mematikan perlawanan Hizbullah.

Konflik Israel-Lebanon adalah serangkaian serangkaian tindakan militer dan bentrokan terus-menerus di Israel utara dan Lebanon yang

Sidik, Jatmika, Diktat Mata Kuliah Politik dan Pemerintahan Timur Tengah, 2004

melibatkan sayap bersenjata Hizbullah dan Angkatan Pertahanan Israel (Israeli Defence Force atau IDF).⁶ Konflik ini berawal ketika Hizbullah menyerang pasukan Israel yang menyusup ke daerah sekitar Aita al Chaab, Lebanon Selatan pada tanggal 12 Juli 2006, dan menawan dua tentara Israel. Tindakan penangkapan ini, sejalan dengan rencana Hizbullah yang disebut sebagai Operasi Truthful Promise ("Janji yang Jujur") yang bertujuan untuk membebaskan warga Lebanon yang ditawan Israel dengan melalui pertukaran tawanan. Peristiwa ini kemudian berlanjut dengan serangan Hizbullah ke wilayah Israel yang menghasilkan delapan orang tentara Israel tewas dan melukai lebih dari 20 orang⁷ Israel kemudian membalas dengan Operasi Just Reward ("Balasan yang Adil"), yang lalu namanya diubah menjadi Operasi Change of Direction ("Perubahan Arah"). Serangan balasan ini meliputi tembakan roket yang ditujukan ke arah Lebanon dan pengeboman oleh Angkatan Udara Israel (IAF), blokade Udara dan Laut serta beberapa serangan kecil ke dalam wilayah Lebanon selatan oleh tentara darat IDF.

Israel menyerang Lebanon dengan menggunakan alasan penawanan 2 tentara Israel oleh Hizbullah dalam suatu serangan lintas perbatasan. Hizbullah berencana untuk menggunakan penawanan ini untuk melakukan pertukaran tawanan untuk membebaskan warga Lebanon dan Palestina yang ditahan Israel. Israel membalasnya dengan menyerang Lebanon bertubi-tubi. Hizbullah membalas kembali dengan meluncurkan roket-roket ke kawasan utara Israel.

Kompas, 16 Juli 2006

http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_Israel-Lebanon_2006

Agresi militer yang dilakukan oleh Israel ini mendapat kecaman dari masyarakat Internasional, lembaga Perdamaian Dunia PBB juga mengutuk keras tindakan Israel tersebut dan berupaya untuk membujuk Israel menghentikan serangannya ke Lebanon. Aksi unjuk rasa anti-Israel terjadi di berbagai tempat di dunia. Aksi protes tidak hanya berlangsung di negaranegara Arab saja tetapi juga di Asia dan Eropa. Negara-negara yang tergabung dalam OKI juga mengutuk aksi brutal Israel. Namun ketika kota-kota Palestina sudah luluh-lantak oleh tank-tank dan senjata Isreal, Lebanon juga dibuat neraka oleh serangan darat, laut, dan udara Israel yang bertubi-tubi, PBB tak dapat berbuat banyak, Amerika Serikat sebagai superpower dunia justru tampak membenarkan tindakan biadab Israel itu. Amerika bungkam ketika Israel membombardir Bandara Internasional Rafiq Hariri dan beberapa infrasturktur penting di Lebanon. Israel secara brutal membombardir infrastruktur Lebanon serta mengepungnya dari darat, udara, dan laut negeri kecil berpenduduk sekitar 4 juta jiwa itu. Sementara itu, Presiden Amerika, George W. Bush dengan enteng mengatakan bahwa Israel punya hak untuk membela dırı.

Dukungan Amerika Serikat tersebut juga diperkuat dengan adanya kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice ke Tel Aviv. Keterlibatan Amerika Serikat terbukti ketika terbongkarnya kasus pengiriman senjata modern Amerika Serikat ke Israel dan dukungannya di Dewan Keamanan PBB. Surat kabar The New York Times (NWT) edisi Sabtu 22 Juli 2006 melansir pernyataan sejumlah pejabat AS yang mengungkapkan

bahwa pemerintahan Bush memutuskan untuk mengirimkan bom-bom berpresisi tinggi untuk membantu Israel, meski harus melalui perdebatan keras di Gedung Putih. Bom-bom tersebut merupakan bagian paket penjualan Amerika Serikat ke Israel yang sudah disepakati tahun 2005 lalu. Pengiriman bom-bom itu dilakukan secara diam-diam dan merupakan keputusan pemerintahan Bush, termasuk mengirimkan sejumlah agen intelijen Amerika Serikat dan Israel. Persenjataan yang dikirim Amerika Serikat sekarang tidak bisa dibandingkan dengan pengiriman senjata yang pernah dilakukan AS untuk membantu Israel dalam perang Arab-Israel tahun 1973.

Hal inilah yang menyebabkan terjadinya inkonsistensi kebijakan pemerintah Amerika Serikat dalam kasus konflik Israel-Lebanon dimana Amerika Serikat yang selalu bicara tentang kebebasan, penegakkan HAM dan demokrasi malah mentolerir penindasan yang dilakukan oleh Israel. Reaksi militer Israel yang sangat berlebihan di Lebanon selatan telah mengakibatkan bencana kemanusiaan yang sangat mengerikan. Lebih dari 500 orang sipil telah meninggal karena serangan bom pesawat tempur Israel dan ribuan atau mungkin jutaan lainnya kehilangan tempat tinggal dan kenyamanan serta keamanan yang selama ini mereka rasakan di Lebanon. Operasi militer Israel yang sangat agresif ini telah memposisikan Israel sebagai penyerang (aggressor) dan rakyat Lebanon sebagai korban.

Sebagai pendukung utama Israel dan negara yang selama ini mengembar-gemborkan perang melawan terorisme, Amerika Serikat tidak

⁸ Suara Merdeka, 24 Juli 2006

menunjukkan sikap bijaksana didalam menyikapi konflik antara Israel — Hizbullah. Amerika Serikat tidak meminta Israel yang secara nyata telah melakukan pelanggaran HAM dan melakukan teror yakni secara membabi buta membunuh masyarakat sipil di Lebanon untuk segera menghentikan agresi militernya menuju kepada meja perundingan tetapi justru mendukung penuh aksi brutal Israel tersebut dan mengirimkan persenjataan militer yang tentu saja dengan misi serta agenda terselubung yang menguntungkan kedua belah pihak.

D. POKOK PERMASALAHAN

Dengan mengacu pada latar belakang masalah diatas, maka penulis mencoba membuat suatu rumusan masalah, yakni : "Mengapa Amerika Serikat mendukung agresi militer Israel ke Lebanon 12 Juli 2006?"

E. KERANGKA DASAR PEMIKIRAN

Teori adalah bentuk penjelasan yang paling umum yang memberitahukan kepada kita mengapa sesuatu terjadi. Dengan demikian selain dipakai untuk eksplanasi teori juga menjadi dasar prediksi.⁹

Teori berfungsi memahami serta memberikan hipotesa secara sistematis, disamping menjelaskan maksud terhadap berbagai fenomena yang ada. Tanpa menggunakan teori, maka fenomena-fenomenanya serta data-data

⁹ Mohtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan InternasionalDisiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1994, p.217.

yang ada akan sulit dipahami, disisi lain teori juga dapat berupa sebuah bentuk pertanyaan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis. 10

Dalam menganalisa permasalahan mengenai kepentingan Amerika Serikat terhadap konflik Israel-Lebanon sehingga dapat mendeskripsikan, mengeksplanasi dan meramalkan fenomena yang terjadi, maka penulis akan mendekati permasalahan tersebut dengan menggunakan salah satu teori dalam hubungan internasional, yaitu: Teori pembuatan kebijakan luar negeri.

Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri

Hans Morgenthau menyatakan bahwa esensi dari politik luar negeri adalah kepentingan nasional. Maksudnya adalah bahwa politik luar negeri suatu negara didasarkan pada kepentingan politik domestik, atau bahwa politik luar negeri merupakan kepanjangan tangan dari politik dalam negeri yang diformulasikan dalam kepentingan nasional negara tersebut¹¹

Politik luar negeri merupakan sikap dan komitmen suatu negara terhadap lingkungan eksternal, strategi dasar untuk mencapai tujuan kepentingan nasional yang harus dicapai diluar batas wilayahnya dan itu diterapkan dalam sejumlah keputusan yang dibuat dalam kebijaksanaan politik luar negeri suatu bangsa. Para aktor pengambil keputusan luar negeri suatu bangsa akan mempertimbangakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap formulasi kebijakan politik luar negerinya. 12

¹⁰ Jack C. Plano, The InternationalRelations Dictionary, California Press, Santa Barbara, 1992,

Djumadi M. Anwar, Diktat Politik Luar Negeri Indonesia. Pengantar Untuk Mahasiswa. Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Revisi, Oktober 2004. hal.52

¹² *Ibid*, hal.58

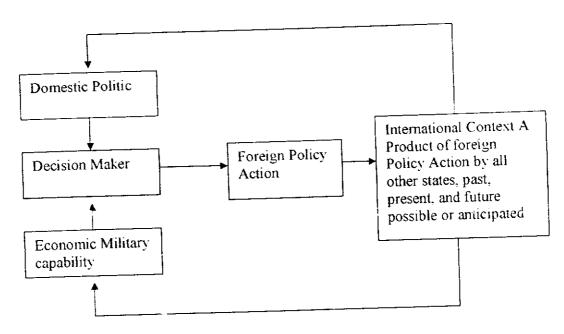
Teori Pembuatan kebijakan luar negeri menurut William D. Coplin menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri dipengaruhi beberapa faktor determinan. Pertama, kondisi politik dalam negeri mengambil keputusan politik luar negeri; kedua, kemampuan ekonomi dan militer; dan ketiga, konteks internasional, yaitu posisi khusus negara dalam hubungannya dengan negara lain dalam sistem itu.¹³

Teori proses pembuatan keputusan luar negeri dari William D. Coplin akan digunakan penulis untuk mengkaji kepentingan Amerika Serikat terhadap kawasan Timur Tengah untuk lebih jelasnya mengenai teori ini dapat dikaji dengan menggunakan diagram Teori Proses Pembuatan kebijakan Luar Negeri William D. Coplin berikut ini

William D. Coplin. Introduction to International Politics. A Theoritical Overview (terjemahan M. Marbun), CV. Sinar baru Bandung, 1992, hal. 30

Gambar 1.1

Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri oleh William D. Coplin



Sumber: Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri yang diungkapkan William D. Coplin Introduction to International Politics: A Theoritical Overview (terjemahan M. Marbun), CV. Sinar Baru bandung, 1992, hal 30)

Proses pembuatan keputusan seperti yang diutarakan oleh William D Coplin, dapat diartikan sebagai akibat yang dipengaruhi tiga konsiderasi utama yang mempengaruhi para pengambil keputusan poitik luar negeri yaitu:

- Situasi politik dalam negeri di negara yang mengambil keputusan. Situasi ini termasuk pula di dalamnya faktor budaya yang mempengaruhi perilaku para decision makersnya.
- Kapabilitas ekonomi dan militer termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan keamanan sebuah negara.

 Konteks internasional termasuk situasi negara yang menjadi tujuan politik luar negeri serta pengaruhnya bagi negara lain bahkan dunia yang terkait maupun yang tidak dalam permasalahannya tersebut.

Kondisi politik dalam negeri

Kerangka konseptual untuk politik dalam negeri ini berfokus pada korelasi antara para pengambil keputusan (decision makers) dengan aktoraktor politik dalam negeri yang berupaya mempengaruhi politik luar negeri. Aktor aktor politik tersebut disebut dengan "Policy Influences" (yang mempengaruhi kebijakan). Hubungan antara aktor-aktor politik dalam negeri ini dengan para pengambil keputusan disebut "policy influences system" (sistem pengaruh kebijakan). ¹⁴

Perpolitikan dalam negeri Amerika Serikat pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Partai politik adalah pihak yang sangat mempunyai kepentingan dalam perpolitikan dalam negeri Amerika Serikat. Sedangkan keanggotaan konggres adalah hasil representasi partai politik yang bekerja sebagai legislator kebijakan. Anggota konggres terdiri dari 2 (dua) macam keanggotaan yang berasal dari partai politik yaitu anggota konggres republik dan anggota konggres demokrat. Pada tahun 2004 lalu, George W. Bush yang berasal dari Partai Republik memenangkan pemilu presiden. Maka secara otomatis anggota konggres didominasi oleh anggota dari Partai Republik.

¹⁴ *Ibid*, hal.74

Keterlibatan Amerika Serikat dalam kancah internasional terutama di kawasan Timur Tengah memang besar. Dari masa ke masa kawasan Timur Tengah telah menjadi garis kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Berkaitan dengan konflik antara Israel-Lebanon, dukungan Amerika yang luar biasa dan tidak kritis terhadap Israel itu dikarenakan adanya pengaruh yang sangat kuat dari Lobby Zionis dan kubu Neo Konservatif yang terdapat dalam Partai Republik dan duduk dalam Pemerintahan Amerika Serikat Keberadaan kaum Neo Konservatif mempunyai peran penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Orang-orang yang berada dalam kelompok Neo Konservatif ini adalah orang-orang imigran Yahudi dari Eropa Timur. Kelompok ini mempunyai jaringan dan gugus kerjasama yang kuat. Mereka tidak hanya menguasai pemerintahan Amerika Serikat, namun memegang peranan dalam hal keuangan media massa dan sebagainya.

Kubu Neo Konservatif ini menduduki berbagai jabatan penting dalam pemerintahan dan konggres. Kubu neo konservatif dan kelompok Zionis-Kristen yang kini berkuasa di dalam tubuh pemerintahan dan Kongres merupakan otak dari berbagai kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang sangat konfrontatif. Dukungan Amerika Serikat dalam agresi militer Israel ke Lebanon tak lepas dari peran para pembuat keputusan di gedung putih yang memang didominasi oleh kaum Neo Konservatif agar segala kebijakan Amerika Serikat khususnya ke Timur Tengah sejalan dengan kepentingan mereka dan tentunya Israel.

Kemampuan ekonomi dan militer

Kemampuan ekonomi dan militer suatu negara berbeda-beda. Kondisi ekonomi dan militer memainkan peran penting dalam proses penyusunan politik luar negeri. Suatu negara harus memiliki kemampuan dan kesediaan untuk menciptakan kemampuan yang diperlukan untuk menopang politik luar negerinya.

Kemampuan ekonomi dan militer domestik merupakan suatu keadaan dan perkembangan perekonomian dalam negeri dan kekuatan militer yang terdapat dalam suatu negara, meliputi sistem pertahanan-keamanan, pembangunan ekonomi masyarakat, letak geografis suatu negara untuk kepentingan dan identitas nasional.

Dalam perspektif Amerika Serikat, kawasan timur Tengah merupakan sebuah kawasan yang memiliki nilai penting dalam pemikiran politiknya. Hal itu terjadi karena adanya faktor minyak sebagai komponen penting bagi kelangsungan industri dan ekonomi Amerika Serikat. Timur Tengah merupakan sebuah kawasan penghasil minyak bumi terbesar dan mempunyai cadangan minyak kira-kira 70% dari cadangan minyak duma. Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Israel-Libanon menyangkut kepentingan vital Amerika Serikat yakni kepentingan akan minyak di kawasan Timur Tengah. Sedangkan kepentingan militer di kawasan ini yakni sebagai pasar penjualan produk senjata-senjata Amerika Serikat, karena pasca Perang Teluk negara-negara di Timur Tengah menjadi konsumen persenjataan Amerika Serikat.

Konteks Internasional

konteks internasional adalah lingkungan Internasional dimana negara itu berada dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Konteks internasional diartikan sebagai produk berbagai keputusan dan tindakan politik luar negeri masa lampau, sekarang, dan yang akan datang yang dapat diantisipasi.

Faktor terakhir yang juga mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah, yakni adanya pengaruh tindakan negara-negara lain, konsentrasi politik, dan isu-isu internasional. Kepemimpinan George W. Bush saat ini membawa banyak perubahan dalam pola kepemimpinan dalam pemerintahan Amerika Serikat. Perubahan dalam pembuatan dan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat lebih nampak setelah terjadi kasus serangan teroris terhadap WTC dan Pentagon, 11 September 2001. Keterlibatan Amerika Serikat dengan menuu ung agresi militer Israel ke Lebanon tidak lain karena dorongan isu terorisme dimana Pasca tragedi World Trade Center tersebut Amerika Serikat dengan program kampanye perang melawan terorisme telah membawa negara-negara di dunia ikut berperang melawan segala bentuk terorisme.

Amerika Serikat menganggap bahwa gerakan perlawanan Hizbullah di Lebanon merupakan gerakan terorisme yang harus dibasmi. Hizbullah merupakan penghambat ambisi Amerika Serikat dalam menegakkan demokrasi versinya sendiri di seluruh kawasan timur Tengah dan Lebanon adalah salah satu sasaran Amerika Serikat.

F. HIPOTESA

Berdasarkan latar belakang serta kerangka dasar pemikiran diatas dapat ditarik suatu hipotesa yakni :

- Kepentingan Amerika Serikat dalam mendukung agresi militer Israel ke Lebanon tidak lain merupakan upaya Amerika Serikat untuk mempertahankan eksistensinya di kawasan ini demi kepentingan nasionalnya, yakni menguasai ladang minyak Timur Tengah dan kepentingan dalam distribusi persenjataan Amerika Serikat.
- 2. Dukungan Amerika tersebut tak lepas dari pengaruh kelompok Zionis dan kaum Neo Konservatif dalam pemerintahan Bush yang berperan besar dalam berbagai pengambilan keputusan terkait kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
- Melalui agresi Israel tersebut Amerika Serikat dapat melumpuhkan dan menjinakkan radikalisme Hizbullah yang sangat anti Amerika.

G. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik penulisan skripsi melalui studi kepustakaan dengan sumber data berasal dari berbagai literatur, buku-buku, artikel-artikel, makalah-makalah, jurnal ilmiah, surat kabar, internet serta dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

H. JANGKAUAN PENELITIAN

Jangkauan penelitian dalam penulisan skripsi ini ditekankan pada kepentingan Amerika Serikat terhadap agresi militer Israel ke Lebanon dengan menggunakan batasan waktu sejak terjadinya konflik Israel-Lebanon sampai diberlakukannya gencaian senjata. Namun tidak menutup kemungkinan waktu diluar jangkauan penelitian apabila dipandang perlu dan masih berkaitan dengan topik penelitian.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan isi skripsi dan dapat dibahas secara sistematis, maka penulis akan mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BABI: PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT

Dalam bab ini akan dibahas mengenai karakteristik serta kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Dan juga membahas tentang perubahan politik luar negeri Amerika Serikat serta keterlibatan AS di Timur Tengah

pasca tragedi 11 september terkait masalah terorisme, HAM dan demokrasi, serta implikasinya terhadap negara-negara dunia Islam.

BAB III: AGRESI MILITER ISRAEL KE LEBANON 2006

Dalam bab ini akan dibahas mengenai sejarah konflik Israel-Lebanon, strategi Israel menguasai Lebanon, serta rangkaian peristiwa yang terjadi selama agresi Israel tersebut. Dalam bab ini juga dibahas sikap dan dukungan Amerika Serikat, upaya menuju gencatan senjata serta Perspektif Hizbullah terhadap Amerika Serikat.

BAB IV : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB SIKAP DAN DUKUNGAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP AGRESI MILITER ISRAEL KE LEBANON 12 JULI 2006

Dalam bab ini akan dibahas fakisi faktor yang mendorong Amerika Serikat memberikan dukungannya dalam agresi Israel tersebut, kepentingan Amerika Serikat mendukung agresi militer Israel ke Lebanon terkait dengan isu terorisme dan gerakan radikalisme Timur Tengah.

BAB V:

Bab terakhir dari penulisan skripsi ini adalah kesimpulan dari pembahasan yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya.